

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal satu disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri peserta didik memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sehingga pendidikan harus berbasis masyarakat dengan memperhatikan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dalam pasal sembilan disebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Sehingga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat adalah sekolah. Lembaga pendidikan tersebut memiliki satu tradisi yang kaya tentang keterlibatan orang tua atau masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan yang terkait dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan sekolah akan menumbuhkan partisipasi dan tanggung jawab untuk memajukan lembaga pendidikan. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (UU N0.20 Tahun 2003 Pasal 54).

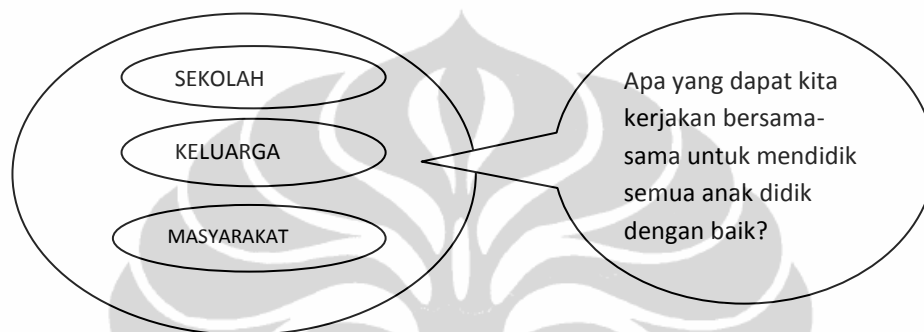
Dalam penjelasan PP No 19 Tahun 2005 Bagian umum dinyatakan bahwa Pendidikan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial kulturalnya akan menumbuhkan individu sebagai anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahap sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya

Partisipasi orang tua/masyarakat terhadap sekolah bisa dilakukan langsung secara individual dan bisa dilakukan secara melembaga melalui saluran komite sekolah. secara teoritik dan normatif dibentuknya komite sekolah memang dimaksudkan untuk menjembatani komunikasi antara sekolah dan orangtua/masyarakat. Di satu sisi mengkomunikasikan aspirasi dan harapan orangtua/ masyarakat agar dapat dirumuskan dalam program-program sekolah dan memantau pelaksanaan serta penggunaan dana, di sisi lain juga memotivasi dan mendorong kesadaran partisipasi orangtua/masyarakat terhadap program-program sekolah. .

Komite sekolah sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang maupun jasa diharapkan dapat mewakili keragaman masyarakat yang ada. Selain itu, pembentukan komite sekolah pada hakikatnya mengantisipasi perubahan dan perkembangan di setiap wilayah sebagai upaya memperhatikan keberagaman kebutuhan pendidikan sesuai dengan keadaan daerah dan peserta didik. Di samping itu komite sekolah mendorong peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan membuahkan adanya suatu strategi dan pendekatan kebijakan yang tepat yang mampu mendorong tumbuhnya sikap kemandirian. Komite sekolah sebagai suatu institusi yang dapat menjadi mitra sekolah dalam menjembatani berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan agar berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, ide dasar pembentukan komite sekolah antara lain berkaitan dengan adanya keinginan suatu organisasi yang dapat membuat dan

membantu masyarakat terlibat dalam pendidikan seperti dalam hal penyediaan dana sarana dan prasarana, bahkan pengelolaan pun agar dapat dilakukan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dengan mengembalikan “kepemilikan” kepada masyarakat. Di kalangan masyarakat sendiri masih banyak yang menyamakan komite sekolah dengan BP3 (sebelum komite sekolah) yang merupakan kepanjangan tangan sekolah (tangan kanan sekolah), yang hanya berperan dalam penggalangan dana untuk kepentingan sekolah.



Gambar 1.1 Paradigma Baru

Komite Sekolah Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan, 2008:52

Secara resmi, keberadaan komite sekolah ditunjuk melalui surat Keputusan Mendiknas antara lain menyebutkan pembentukan komite sekolah No 44/U/2002 tentang Dewan Sekolah dan Komite Sekolah. surat keputusan tersebut antara lain menyebutkan pembentukan komite sekolah menganut prinsip transparan, akuntabilitas, dan demokratis. Lahirnya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 telah mengantarkan proses pembentukan Komite Sekolah hampir di seluruh daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Proses pembentukan beberapa komite sekolah ada yang sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada, bahkan ada yang sudah melesat sedemikian rupa dengan kreasi dan inovasinya yang membanggakan sehingga komite sekolah tersebut telah benar-benar dirasakan peran dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun justru perlu diakui masih banyak diantaranya yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan (optimal) dan ketentuan yang ada. Dengan menyadari adanya berbagai variasi tersebut yang lebih penting adalah bukan lagi soal mendirikan atau membentuknya, tetapi bagaimana menggerakkan roda organisasi dan manajemen badan yang mandiri

ini, agar komite sekolah yang ada segera melaksanakan kegiatan dalam mengemban peran dan fungsinya

Tabel 1

Penjabaran Peran Komite Sekolah ke Dalam Fungsi Komite Sekolah

No.	Peran KS	Fungsi KS	Kegiatan Operasional
1.	Pemberi pertimbangan (advisory)	1.1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan; (2) RAPBS (3) kriteria kinerja satuan pendidikan; (4) kriteria tenaga kependidikan; (5) kriteria fasilitas pendidikan; dan (6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.	<p>1.1.1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat</p> <p>1.1.2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi kepada sekolah</p> <p>1.1.3. Menyampaikan masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi secara <u>tertulis</u> kepada sekolah, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan</p> <p>1.1.4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal</p> <p>1.1.5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan (PAKEM)</p> <p>1.1.6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah</p>
2.	Pendukung (supporting)	2.1. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	<p>2.1.1. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental dengan orang tua dan anggota masyarakat</p> <p>2.1.2. Mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industry untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.</p> <p>2.1.3. Menghimbau dan mengadakan pendekatan kepada orang tua dan</p>

No.	Peran KS	Fungsi KS	Kegiatan Operasional
			<p>masyarakat yang dipandang mampu untuk dapat menjadi narasumber dalam kegiatan intrakurikuler bagi peserta didik</p> <p>2.1.4. Memberikan dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anak-anak</p> <p>2.1.5. Memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebaran narkoba di sekolah</p> <p>2.1.6. Memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah</p>
		Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan	<p>Memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah</p> <p>Memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno KS</p> <p>Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah</p> <p>Membantu sekolah dalam rangka penggalangan dana masyarakat untuk pengumpulan dana abadi</p>
		Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu	<p>Melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa</p> <p>Mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, misalnya panggung hiburan untuk sekolah dan masyarakat</p> <p>Membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat.</p>
3.	Pengontrol (controlling)	3.1. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan	<p>2.1.7. Mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau incidental dengan kepala sekolah dan dewan guru</p> <p>2.1.8. Sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah, atau dengan dewan guru di sekolah</p> <p>2.1.9. Meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa</p> <p>2.1.10. Bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni</p>

No.	Peran KS	Fungsi KS	Kegiatan Operasional
4.	Mediator	4.1 Melakukan kerjasama dengan masyarakat	4.1.1 Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khususnya dengan DUDI 4.1.2 Mengadakan peninjauan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah
		4.2 Menampung dan mengalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.	4.2.1 Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat 4.2.2 Menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap sekolah

Sumber : Acuan Operasional Dan Indikator Kinerja Komite Sekolah,2004:33

Komite Sekolah sebagai organisasi publik yang berbasis kemasyarakatan adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Sedangkan yang paling tepat untuk mengukur mutu pendidikan adalah hasil evaluasi ujian akhir yang diukur melalui ujian akhir nasional. Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jakarta Selatan mendapatkan peringkat pertama selama empat tahun berturut-turut di DKI Jakarta. Bahkan, selain mampu mempertahankan prestasi akademis, SMP di Jakarta Selatan juga mendapatkan juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) lima kali berturut-turut (<http://metro-jaksel.blogspot.com/2009/07/kinerja-kepsek-dievaluasi-enam-bulan.html>).

Jakarta Selatan sebagai salah satu kotamadya yang memberikan subsidi pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) telah menyelenggarakan pendidikan gratis di jenjang sekolah menengah pertama negeri. Tantangan komite sekolah di Jakarta Selatan demikian besar karena sebagian besar peran komite sekolah masih terbatas pada pengumpulan dana untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

masih sedikit komite sekolah yang berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, terutama mutu lulusannya, termasuk mutu proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi) . Apalagi dengan diselenggarakannya pendidikan gratis orang tua merasa tidak mempunyai tanggung jawab lagi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.. Masyarakat umum masih menganggap sekolah negeri adalah milik pemerintah. Padahal peran komite sekolah tidak hanya menyangkut penggalangan dana saja. Partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah masih kurang digerakkan untuk menopang pengelolaan pendidikan di sekolah, sehingga kesadaran untuk rasa memiliki masih kurang. Padahal dengan adanya rasa memiliki dari masyarakat setempat pada gilirannya akan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk memajukan sekolah. Selain itu masih terdapat kehadiran komite hanya sebagai pelengkap atau sekedar hanya memenuhi aspek formal legal sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Apakah komite sekolah organisasi pelayanan publik berperan sebagai lembaga yang mewadahi peran serta masyarakat guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, relevan, dan efisien? Berdasarkan hasil diskusi dengan dinas pendidikan Jakarta Selatan dan tim teknis Direktorat Pembinaan SMP bahwa rata-rata komite sekolah di Jakarta memiliki kondisi yang sama, yaitu dibentuk asal-asalan, ada pengurus yang aktif dan tidak aktif. Tidak aktif karena sibuk, tidak punya waktu ada juga yang menganggap cukup ketua , sekretaris, dan bendahara saja yang perlu bertemu dengan para orang tua murid, . Mereka memang memandang tak ada bedanya antara BP3 dulu dan komite sekolah yang sekarang ini. Dalam pandangan mereka, kehadiran komite sekolah tak lebih dari untuk membantu sekolah “menghadapai orang tua murid” dalam rangka mengumpulkan dana bagi keperluan sekolah. karena, bisa dimengerti bila tak pernah ada rapat-rapat pengurus yang mereka selenggarakan. Upaya menggerakkan komite sekolah menjadi lebih aktif juga tak dilakukan oleh pihak sekolah dengan alasan tidak tersedia ruang kantor yang khusus bagi komite sekolah. Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa komite sekolah hanya ombyo’an saja. Orangnyanya banyak, tetapi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu permasalahan yang terdapat di lapangan antara lain (dalam acuan operasional dan indicator kinerja komite sekolah, 2004:2) yaitu:

1. Proses pembentukan komite sekolah di lingkungan sekolah kebanyakan belum sesuai dengan harapan
2. Banyak komite sekolah dibentuk dengan pola-pola stigmatis yang diwarisi dari BP3 atau POMG
3. Timbulnya kesan dan pandangan negatif dari para orang tua dan masyarakat terhadap kinerja komite sekolah bahwa sumbangan sekolah menjadi lebih besar karena dibentuknya komite sekolah.
4. Praktik pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah yang dinilai menyimpang antara lain menjadi model komite sekolah yang terlalu meniru gaya birokrat atau menjadi stempel sekolah (di bawah komando kepala sekolah) di satu sisi ada yang bergaya eksekutor
5. Komite sekolah yang telah dibentuk banyak yang belum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun sendiri dan belum memiliki program berdasarkan aspirasi orang tua sebagai komponen utama *stakeholder* pendidikan

Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan Komite sekolah misalnya dilibatkan dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun sekolah. Selain itu, komite juga dapat melakukan pendampingan terhadap siswa yang mengikuti even perlombaan atau kompetisi, baik lingkup lokal maupun nasional. Komite juga dapat mengadakan seminar atau ceramah tentang upaya meningkatkan kualitas belajar dan mengajar sehingga sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan. Hal yang tidak kalah penting adalah komite juga dapat mendorong untuk meningkatkan penelitian di kalangan siswa dengan pembentukan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR). Jika diperlukan dapat diadakan lokakarya penulisan karya ilmiah dan sosialisasi KIR di kalangan siswa.

Orang tua juga berharap komite sekolah membina dan mengembangkan sosialisasi dan komunikasi dengan orang tua/wali murid dengan cara penyampaian rencana anggaran program kerja sekolah, pemberdayaan orang tua peduli/donator, pemberdayaan alumni, melakukan komunikasi lintas sektor. Selain itu ada yang

berpendapat bahwa komite sekolah melaksanakan manajemen yang tidak terbuka dalam menjalankan roda organisasi terdapat pengurus yang tidak solid atau kompak sehingga terdapat perpecahan di dalam organisasi sendiri. Di dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pos Kota (dalam www.poskota.co.id tanggal 15/7/09) bertema pungutan biaya sekolah (PBS) ada pendapat yang berasal dari kalangan masyarakat bahwa komite sekolah seharusnya melibatkan RT RW dimana sekolah tersebut berada, karena masalah listrik berupa lampu penerangan dan kebersihan harus melibatkan warga sekitar, sekolah tidak bisa berdiri sendiri.

Kinerja komite sekolah memang sangat bervariasi. Kinerja itu masih berada dalam garis kontinum dari “sebagai stempel” sampai “sebagai eksekutor”. Komite sekolah sebagai stempel artinya badan ini hanya sekedar menjadi pengekor kemauan daerah dan sekolah, sampai dengan badan yang ditakuti oleh pihak pemerintah daerah atau sekolah. sebagai lembaga stempel, komite sekolah sering mendapat rapot merah oleh warga masyarakat, karena komite sekolah dinilai tidak memiliki kepentingan masyarakat dan orang tua, misalnya dalam hal pengambilan keputusan tentang biaya pendidikan. Sebaliknya, ada juga komite sekolah yang masih dilihat dengan sebelah mata oleh pemerintah daerah dan sekolah, karena sering dipandang lebih sebagai pesaing, atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang berseberangan atau bahkan berlawanan bukan sebagai mitra seajar. Komite sekolah diharapkan lebih efektif, tak terlalu jadi polisi buat sekolah (sebagai guru atau kepala sekolah) tapi juga mendorong pengembangan sekolah ke arah lebih baik, bersinergi, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah.

Terdapat banyak kesenjangan yang terjadi antara peraturan, dan praktik yang terjadi di lapangan,. Karena itu *stakeholder* pun berharap agar Komite Sekolah dapat membawa aspirasi mereka. Jika digambarkan hubungan antara peran dan fungsi komite sekolah yang sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002, kondisi riil yang terjadi di lapangan serta harapan dari stakeholder adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Hubungan peran dan fungsi komite sekolah berdasarkan Kepmendiknas No.044/U/2002, praktik di lapangan, dan harapan stakeholder

Komite sekolah sebagai organisasi yang solid harus mengelola dan membuat keputusan-keputusan sesuai dengan peran dan fungsi yang sudah ditetapkan oleh aturan yang berlaku dan juga sesuai dengan *stakeholder*. Komite sekolah harus menyadari bahwa dunia pendidikan merupakan investasi penting dan bersifat jangka panjang tidak akan bisa diselenggarakan dengan baik dan tidak mungkin mencapai kemajuan jika hanya diserahkan kepada pemerintah semata. Faisal (2007:37)..mengatakan bahwa Komite sekolah harus benar-benar hadir sebagai organisasi yang mewakili orangtua yang ditandai dengan kemampuan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik bahkan dapat memperluas secara cerdas dan kreatif peran dan fungsinya bagi peningkatan mutu sekolah. selain itu komite sekolah sebagai organisasi yang hidup di era modern harus memiliki sifat organisasi modern, yaitu bersifat terbuka yang dipengaruhi dan mempengaruhi factor lingkungannya (S.B. Hari Lubis dan Martani Husaini, 1987:6). Jika organisasi tidak melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditentukan akan terjadi kesenjangan di lapangan, apalagi jika stakeholder mempunyai harapan yang belum terpenuhi. Oleh karena itu organisasi ini harus mengadakan revitalisasi untuk membuat perubahan-perubahan yang selaras dengan lingkungannya.

Revitalisasi menurut Gouillart dan Kelly (1995) adalah perubahan organisasi yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan organisasi dengan cara menyelaraskan organisasi dengan lingkungannya. Keselarasan organisasi dengan lingkungannya menurut Gouillart dan Kelly (1995) dapat dicapai dengan 3 pendekatan, sebagai berikut: pencapaian focus pasar, penciptaan bisnis baru, pemanfaatan teknologi informasi

1.2.Perumusan Masalah

Komite sekolah memiliki beberapa peran. Pertama, komite sekolah berperan menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Kedua, komite sekolah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu seperti menggalang dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, baik lewat kerjasama dengan masyarakat-perseorangan maupun organisasi –dunia usaha dan pemerintah. Ketiga, komite sekolah juga berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Di samping itu, komite sekolah juga bisa memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan; kriteria kinerja satuan pendidikan; criteria tenaga kependidikan khususnya guru,/tutor dan kepala satuan pendidikan; criteria fasilitas pendidikan; dan hal lain-lain yang terkait dengan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya itu, komite sekolah memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan ini juga melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industry dan pemerintah, berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi,

pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.

Di samping itu komite sekolah juga memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan. Komite sekolah juga berfungsi dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian peran dan fungsi Komite Sekolah di tiga sekolah menengah pertama di kota Jakarta Selatan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002?
2. Bagaimana Strategi revitalisasi yang diperlukan agar peran dan fungsi Komite Sekolah di tiga sekolah menengah pertama di Kota Jakarta Selatan menjadi optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah pertama di Kota Jakarta Selatan
2. Untuk mengetahui Strategi revitalisasi yang diperlukan agar peran dan fungsi Komite Sekolah di tiga sekolah menengah pertama di Kota Jakarta Selatan menjadi optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Jakarta Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis berupaya memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia akademik umumnya mengenai pemahaman tentang kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, khususnya tentang komite sekolah

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berupaya memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk menerbitkan sebuah Peraturan Pemerintah tentang Komite Sekolah sehingga dijadikan panduan dan *benchmarking* bagi seluruh daerah di Indonesia

1.5 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai revitalisasi Komite Sekolah di Kota Jakarta Selatan, peneliti melakukan pembatasan sebagai berikut ;

1. Program kerja Komite Sekolah
2. Peran dan fungsi Komite Sekolah
3. Komite Sekolah yang menjadi penelitian adalah Komite Sekolah di tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berkedudukan di kota Jakarta Selatan
4. Stakeholder Komite Sekolah dalam penelitian ini adalah pengurus komite sekolah, orangtua murid, kepala sekolah, dan guru di tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Jakarta Selatan

1.6. Sistematika Penulisan

Tesis ini akan terdiri dari enam bab ditambah kepustakaan yang menguraikan apa yang tercantum dalam judul “REVITALISASI KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI TIGA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA JAKARTA SELATAN”

Rincian sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian.

Bab II menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi teori, pendapat ahli, dan hasil diskusi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pelayanan publik, teori organisasi, partisipasi masyarakat, revitalisasi organisasi dan manajemen perubahan. Kemudian teori yang dikutip akan membentuk model tentang bagaimana kondisi organisasi dan strategi revitalisasi organisasi yang dibutuhkan oleh Komite Sekolah di Kota Jakarta Selatan

. Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari sifat dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, panduan wawancara, analisis data.

Bab IV menguraikan tentang gambaran umum tentang komite sekolah, peran dan fungsi, kedudukan dan sifat, tujuan

Bab V memaparkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri 3 bagian.. Bagian pertama menjelaskan tentang kategorisasi sekolah yang menjadi lokasi penelitian. Bagian kedua menggambarkan kondisi riil Komite Sekolah di tiga sekolah menengah pertama di Kota Jakarta Selatan saat ini ditinjau dari peraturan yang terkait serta harapan dari *stakeholders* terhadap peran dan fungsi Komite Sekolah. Bagian ketiga menjelaskan strategi revitalisasi yang diperlukan Komite Sekolah untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya. Bab ini juga memaparkan hasil wawancara dengan Komite Sekolah, Kepala Sekolah,

Orang Tua Murid, Guru terhadap tugas peran dan fungsi Komite Sekolah. Selain itu dalam bab ini berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada model penelitian berdasarkan analisis terhadap kondisi riil Komite Sekolah yang didukung dengan data primer dan wawancara dengan Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Orang Tua Murid, Guru, serta analisis terhadap strategi revitalisasi organisasi yang diperlukan oleh Komite Sekolah di tiga sekolah menengah pertama di Kota Jakarta Selatan.

Bab VI yang merupakan bab penutup membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil pembahasan masalah pokok, sedangkan saran merupakan pemikiran bagi perbaikan kondisi organisasi Komite Sekolah di Kota Jakarta Selatan, strategi revitalisasi organisasi Komite Sekolah di Kota Jakarta Selatan serta segala sesuatu yang dapat memberikan pemikiran positif terhadap masalah yang dihadapi.